

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG USAHA, PERTAMBANGAN, STUDI KELAYAKAN BISNIS, DAN AMDAL

A. Usaha dalam Islam

1. Pengertian Usaha

Di dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan pekerjaan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan di dalam UU No.3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁸

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban manusia. Menurut Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dalam kitabnya *Al-Iktisab Fi Al-Rizq Al-Mustathab* seperti dikutip oleh Adi Warman Azwar Karim, bahwa kerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan dan wajib hukumnya, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah swt.¹⁹

Bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah swt

¹⁸ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.

¹⁹ Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2004), edisi 1, h. 235.

dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”(QS. Luqman (31):20)

Dari ayat diatas, dapat dirangkaiakan sebuah urutan pemahaman yang berisi beberapa kata kunci, yakni manusia sebagai khalifah, dan salah satu peran manusia selaku khalifah adalah mengelola segala yang ada dilangit dan bumi. Menurut Syafi'i Antonio,²² secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk memenuhi tugas tersebut, Allah swt memberikan manusia dua anugrah utama, yaitu system kehidupan atau *manhaj al-hayah* dan sarana kehidupan atau *wasilah al-hayah* guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Semua itu dikerjakan sebagai wujud ibadah kepadanya.

2. Prinsip-Prinsip Usaha Dalam Islam

a. Prinsip Tauhid

Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah. Tauhid adalah prinsip umum hukum islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la ilaha illallah* (tiada tuhan selain Allah).

b. Prinsip Keadilan (al,adl)

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 7

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus di penuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya beredar pada segelintir orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.²³

c. Prinsip al-Ta’awun (tolong menolong)

Prinsip ta’awun berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslimin berada saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Memberikan peluang untuk berkarya dan berusaha dan memberikan sesuatu yang kita usahakan atau hasil dari usaha kita kepada yang membutuhkan seperti zakat.

d. Usaha yang halal dan barang yang halal

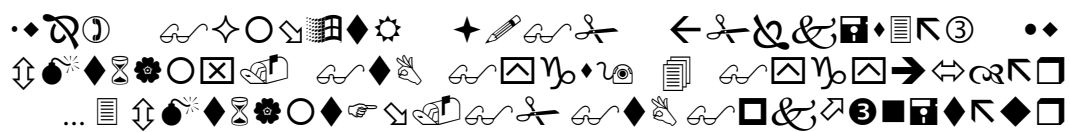
Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal, memakan makanan yang halal, dan menggunakan rizki secara halal pula.²⁴

e. Berusaha sesuai dengan batas kemampuan

²³ [Http://www.blogspot.com,Inna Ana, Prinsip-Prinsip Usaha dalam Islam.html](http://www.blogspot.com,Inna Ana, Prinsip-Prinsip Usaha dalam Islam.html)

²⁴ Muhandis Natadiwirya, op.cit, h.52

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira itu sesuai dengan perintah, karena kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya. Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia, sebagaimana firman Allah:



Artinya: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya."* (QS.Al-Baqarah (2):286)

3. Tujuan Usaha Dalam Islam

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syariat, seseorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan dan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu kategori *daruriyat* (primer), *bajiyat* (sekunder), dan *kamaliyat* (tersier-pelengkap). Dalam terminology Islam “ dariyat” adalah kebutuhan secara mutlak tidak dapat dihindari, karena

merupakan kebutuhan-kebutuhanyang sangat mendasar, bersifat elastis bagi kehidupan manusia.²⁵

b. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi mewujudkan keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing.

c. Usaha untuk memakmurkan bumi

Bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari *maqasidus syari'ah* yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al-quran serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al-imam Arraghib al-Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga kepentingan. Kalau bukan untuk tiga kepentingan itu, maka ia tidak akan ada. Yaitu untuk memakmurkan bumi, menyembah Allah, dan khalifah Allah.

d. Usaha untuk kerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk bekerja dan berusaha meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya, juga meskipun tidak satupun dari makhluk Allah, termasuk hewan, dapat memanfaatkannya. Ia tetap

²⁵ Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.8

wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.

B. Tinjauan Tentang Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Menurut undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan bisnis, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Menurut kamus istilah teknik pertambangan umum tahun 1994 dinyatakan bahwa pertambangan merupakan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian sampai dengan pemasarannya.²⁶

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia.²⁷

²⁶ <http://endah121.blogspot.com/2010/01/pengertian-tambangtahap-tahapnya.html>

²⁷ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)h.

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum/badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia.²⁸ Sedangkan kegiatan pertambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakannya sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (Daerah dan Pusat).²⁹

Di dalam undang-undang pokok pertambangan usaha-usaha pertambangan dirumuskan sebagai berikut:

1. Usaha pertambangan penyelidikan umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik didaratan perairan ataupun dari udara dengan maksud untuk memuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
2. Usaha pertambangan eksplorasi ialah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/lebih seksama adanya sifat dan letak galian.
3. Usaha pertambangan eksploitasi ialah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
4. Usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian ialah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya serta memperoleh unsure-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut.

²⁸ Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), h.252

²⁹ Haryanto, *Op.cit*, h.38

5. Usaha pertambangan pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah eksplorasi, eksploitasi atau dari tempat pengolahan/ pemurnian ke tempat lain.
6. Usaha pertambangan penjualan ialah segala usaha penjualan dari hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian.³⁰

2. Penggolongan Bahan Galian

Penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara.
- b. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
- c. Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk kedalam golongan A dan B.

Bahan galian apa saja yang termasuk kedalam masing-masing golongan tersebut diatur berdasarkan ketentuan pengelompokan lebih rinci, dalam peraturan pemerintah No.27 Tahun 1980, yaitu:

1. Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari:

³⁰ Sukandarrumidi, *Loc.cit.*

- a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam;
 - b. Bitumen padat, aspal;
 - c. Antrasit, batu bara, batu bara muda;
 - d. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya;
 - e. Nikel, kobalt;
 - f. Timah.
2. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari:
- a. Besi, mangan, molybdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium;
 - b. Bauksit, tembaga, timbale, seng;
 - c. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - d. Arsen, antimony, bismuth;
 - e. Yttrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya;
 - f. Berrillium, korundum, zircon, Kristal kwarsa;
 - g. Kriolit, flouspar, barit;
 - h. Yodium, brom, khlor, belerang.
3. Bahan galian golongan C atau bahan galian industry, terdiri dari:
- a. Nitrat, phosphate, garam batu;
 - b. Asbes, talk, mike, grafit, magnesit;
 - c. Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
 - d. Batu permata, batu setengah permata;
 - e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
 - f. Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome;
 - g. Marmer, batu tulis;

- h. Batu kapur, dolomite, kalsit;
- i. Granit, andesit, basal, trakit, tanah liat, dan pasir, sepanjang tidak mengandung unsure mineral golongan A maupun B dalam skala yang berarti dari segi ekonomi pertambangan.³¹

3. Izin Usaha Pertambangan

Berdasarkan UU No.11 tahun 1967, Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setelah UU No.4 tahun 2009 diberlakukan maka KP diubah menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan). KP yang diberikan sebelum ditetapkannya UU No. 4 tahun 2009 dan PP No.23 tahun 2010 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir, serta wajib:

- a. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan ketentuan PP No. 23 tahun 2010 dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya PP tersebut.
- b. Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah KP sampai dengan jangka waktu berakhirnya KP.
- c. Melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat lima tahun sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2009.³²

Sebagaimana di atur dalam pasal 1 (7) UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (**UU Minerba**), Izin Usaha

³¹ Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 1999) cet- 1

³² [Http://tambang.findiscussion.com/t28-pertambangan.html](http://tambang.findiscussion.com/t28-pertambangan.html)

Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan wewenang Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk pemberian IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (**PP 23/2010**) mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada:

- a. Badan usaha, yang dapat berupa Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Koperasi.
- c. Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperolehnya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan satu IUP maupun beberapa IUP.

Dalam pasal 36 UU Minerba membagi IUP kedalam dua tahap, yaitu:

- a. IUP Eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- b. IUP Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.³³

³³ *ibid*

Dalam pasal 39 UU Minerba mengatur bahwa IUP eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

- a. Nama perusahaan.
- b. Lokasi dan luas wilayah.
- c. Rencana umum tata ruang.
- d. Jaminan kesungguhan.
- e. Modal investasi.
- f. Perpanjangan waktu tahap kegiatan.
- g. Hak dan kewajiban pemegang IUP.
- h. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan.
- i. Jenis usaha yang diberikan.
- j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan.
- k. Perpajakan.
- l. Penyelesaian perselisihan.
- m. Iuran tetap dan iuran eksplorasi.
- n. Amdal.³⁴

Sedangkan untuk IUP operasi produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :

- a. Nama perusahaan.
- b. Luas wilayah.
- c. Lokasi penambangan.

³⁴ *ibid*

- d. Lokasi pengolahan dan pemurnian.
- e. Pengangkutan dan penjualan.
- f. Modal investasi.
- g. Jangka waktu berlakunya IUP.
- h. Jangka waktu tahap kegiatan.
- i. Penyelesaian masalah pertahanan.
- j. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang.
- k. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
- l. Perpanjangan IUP.
- m. Hak dan kewajiban pemegang IUP.
- n. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan.
- o. Perpajakan.
- p. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi.
- q. Penyelesaian perselisihan.
- r. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- s. Konservasi mineral atau batubara.
- t. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri.
- u. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik.
- v. Pengembangan tenaga kerja Indonesia.
- w. Pengelolaan data mineral atau batubara, dan

- x. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Dalam Pasal 40 UU Minerba IUP diberikan terbatas pada satu jenis mineral atau batubara. Dalam hal pemegang IUP menemukan mineral lain dalam WIUP yang dikelolanya maka pemegang IUP tersebut mendapatkan prioritas untuk mengusahakan mineral yang ditemukannya. Sebelum pemegang IUP tersebut mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, diatur bahwa pemegang IUP tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal pemegang IUP tersebut berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, maka pemegang IUP tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lainnya yang tidak berwenang.³⁵

C. Tinjauan Tentang Studi Kelayakan Bisnis

Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi pengusaha itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Lebih dari itu yang terpenting adalah ada yang mengelolah dan mengatur sumber daya alam yang belum terjamah. Sebaliknya, dampak negatifpun tidak akan terlepas dari aspek ekonomi, misalnya eksplorasi sumber daya yang berlebihan, masuknya pekerja dari luar daerah sehingga mengurangi peluang bagi masyarakat sekitarnya.

³⁵ Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dampak positif dari aspek bagi masyarakat secara umum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan sarana lainnya. Kemudian bagi pemerintah dampak negatif dari aspek social adanya perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat.

Dampak negatif dalam aspek social termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat dan struktur sosial lainnya.³⁶ Jadi, dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditela'ah apakah jika usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan, karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian.³⁷ Mempertimbangkan dan menilai dampak sosial, ataupun dukungan dari masyarakat disekitar lokasi.³⁸

D. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Konsep Pengolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk di telaah sebelum sebuah investasi atau usaha dijalankan. Sudah barang tentu telaah yang dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu usaha jadi dilakukan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun dimasa yang akan datang. Studi itu disamping

³⁶ Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2009), Ed. 2. Cet 6, h. 193

³⁷ *Ibid*, h. 194

³⁸ Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011), Ed. 1, cet. 2, h. 125

untuk mengetahui dampak yang bakal timbul, juga mencari jalan keluar untuk mengatasi dampak tersebut. Studi inilah yang disebut dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).³⁹

Pengertian analisis dampak lingkungan (AMDAL) menurut peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999 pasal 1 adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana dan kegiatan. Arti lain analisis dampak lingkungan adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak dan jika ya, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya.⁴⁰

Pengutamaan telaah AMDAL secara khusus adalah meliputi dampak lingkungan sekitarnya, baik didalam maupun diluar suatu usaha atau proyek yang akan dijalankan. Arti keberadaan suatu usaha atau proyek akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang berada disekitar rencana lokasi, baik dampak rencana usaha ataupun kegiatan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah ada.

Sasaran utama dari AMDAL adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Atau dengan kata lain untuk menjaga lingkungan hidup dari segala bentuk pengrusakan, pencemaran atau kegiatan yang merugikan kelestarian lingkungan hidup yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri. Dalam rangka menjaga dan menyelamatkan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan studi AMDAL yang benar.

³⁹ Kasmir, Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) Cet- 1, h. 303

⁴⁰ *Ibid.* h. 304

Adanya kehidupan di bumi merupakan penyangga tatanan dan keadaan lingkungan seperti sekarang ini. Tatanan tersebut mengikuti hukum alam yang tidak terelakkan. Dalam hubungan ini Hipotesis Gala (dewi bumi) dan James Lovelock (odum 1983) mengemukakan bahwa bumi dan kehidupan ini saling mempengaruhi sehingga bumi dapat mendukung kehidupan karena pengaruh adanya kehidupan itu sendiri.⁴¹

Dengan demikian, hubungan antara kebumian dan lingkungan tidak terbatas pada fenomena yang berkaitan dengan tatanan kehidupan, melainkan terkait pula dengan aspek kelestarian lingkungannya.⁴²

Masalah yang sering muncul dalam pengelolaan sumber daya alam adalah berbagai dampak negatif yang mengakibatkan manfaat yang di peroleh dari sumber daya sering tidak seimbang dengan biaya sosial yang harus ditanggung.⁴³

Berbagai peraturan dan cara dilakukan agar kegiatan penambangan dapat dilakukan dengan baik dan benar dalam kaitannya untuk menekan dampak negatif yang telah ada dan selalu diusahakan peningkatan atau perbaikannya. Kegiatan usaha juga tidak saja akan berdampak negatif, tetapi juga akan membawa dampak ekonomi atau akan mendatangkan kontribusi positif kearah pertumbuhan ekonomi.⁴⁴

⁴¹ Moch. Munir, *Geologi Lingkungan*, (Malang: Bayumedia, 2003) Cet. Ke-1, h. 315

⁴² *Ibid*, h. 17

⁴³ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) Cet-3, h. 17

⁴⁴ Jumingan, *op.cit*, h. 161